RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN.PNG TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

Khusnul Khofifah¹, Yusron Marzuki²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

Email : khusnulkhofifah1@gmail.com

ABSTRAK

Penjatuhan pidana narkotika masih menuai kontroversi dalam penegakkan hukumnya dikarenakan kepastian hukum peraturan mengenai penyalahgunaan narkotika diatur dalam produk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menggolongkan pelaku, perbuatan, dan kesesuaian pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi semenjak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Memiliki kemungkinan bagi pelaku pecandu narkotika bagi diri sendiri untuk mendapatkan rehabilitasi medis oleh pertimbangan hakim dalam keputusannya. Hal tersebut yang akan dikaji pada objek penelitian Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG sebagaimana hakim menjatuhkan putusan pidana penjara bukannya rehabilitasi, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode normatif, yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dibahas dan dianalisis dari hal-hal yang bersifat umum hingga menemukan kesimpulan. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kata Kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pidana

ABSTRACT

*The imposition of narcotics crimes still reaps controversy in law enforcement due to the legal certainty of regulations regarding narcotics abuse regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by classifying the perpetrators, actions, and suitability of the sentences imposed. However, since the existence of the Supreme Court Circular Number 4 of 2010 concerning the Placement of Narcotics Addict Victims of Abuse in Institutions for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. It has the possibility for narcotics addicts themselves to obtain medical rehabilitation by a judge's Considerations on decision. This will be examined in the research object of Decision Number 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG as the judge sentenced him to imprisonment instead of rehabilitation, therefore this study uses a normative method, which is descriptive-analytic in nature, namely research that is discussed and analyzed from general matters to conclusions. The sources of legal materials used in the research contain primary and secondary data, then an approach is made using a statutory approach (*statue approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), and case approach (*case approach*).*

Keywords: *Narcotics, Judge Consideration, Punishment*

PENDAHULUAN

Hukum dalam konsep pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpotensi menjadi tempat sasaran untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara illegal. Sasaran yang dituju oleh narkotika ini telah menjangkau hingga berbagai penjuru daerah secara merata dan menjangkau kalangan strata sosial rendah hingga strata sosial atas.

Pada awalnya narkoba bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama di bidang kesehatan, namun karena suatu sebab narkoba disalahgunakan hingga menyebabkan penderitaan, kejahatan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkoba perlu diatur oleh produk hukum aturan perundang-undangan.

Undang-Undang tentang narkoba sudah disahkan oleh pemerintah negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kendati demikian dalam praktik penegakan hukum tentang masalah narkoba masih carut marut dan berjalan tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan produk hukum tersebut dikarenakan mental dan moral aparaturnya penegak hukum kurang memadai dalam menangani narkoba dan masyarakat dengan rendahnya pengetahuan karena belum disosialisasikan dengan baik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, kemudian ada beberapa rumusan pasal yang mengaitkan status korban sama dengan pelaku tindak pidana narkoba atau dalam hal ini disebut pecandu narkoba. Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba sudah dapat dikualifikasikan tindak pidana narkoba, namun pada keadaan tertentu mereka yang menyalahgunakan bisa juga berkedudukan sebagai korban.

Berkaitan dengan hal tindak pidana narkoba, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Atas penerbitan SEMA tersebut, maka ada kemungkinan peradilan memutus perkara tindak pidana narkoba mengarah ke putusan hukuman rehabilitasi sebagaimana tempat tersebut dikhususkan pada persyaratan tertentu.

Korelasi uraian diatas termaktub dalam suatu putusan Pengadilan Ponorogo pada nomor perkara Putusan 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG, dimana terdapat suatu kasus penyalahgunaan narkoba golongan I bagi pelaku, kemudian divonis oleh hakim dengan pidana penjara selama satu tahun tujuh bulan tanpa rehabilitasi medis. Alasan hakim dalam memutus perkara tersebut karena pelaku tidak memenuhi persyaratan rehabilitasi yang tercantum pada SEMA. Atas dasar hal tersebut penulis melakukan penelitian terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode normatif, yang bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang dibahas dan dianalisis dari hal-hal yang bersifat umum hingga menemukan kesimpulan. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berupa proses menemukan aturan hukum yang berguna menjawab isu hukum demi menghasilkan argumentasi, teori guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam prespektif ilmu hukum (P. Marzuki, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG Menurut Sistem Peradilan Hukum Pidana Narkotika

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan padaputusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pada kasus tindak pidana narkotika perkara Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN.PNG terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetyo alias Tolo bid Bedjo Sardji, Terdakwa II atas nama Jody Prasetyo alias Simun Bin Sudjai, dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan terbukti dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
2. Pidana penjara masing-masing empat tahun enam bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 935.750.000,00

3. Marang bukti berupa 1 dosbook Hp Oppo berwarna putih, 1 buah bong terbuat dari botol bekas minuman You C 1000, 1 buah korek gas, 1 buah handphone Oppo berwarna putih, 1 buah gunting tangan berwarna hitam

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Kemudian akan diuraikan beberapa analisis pertimbangan hakim yang dimana hal yang bersifat mendasar mengenai dasar-dasar perbuatan tindak pidana narkotika. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.:

1. Pertimbangan yuridis

a. Unsur setiap orang

Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetyo alias Tolo bid Bedjo Sardji, Terdakwa II atas nama Jody Prasetyo alias Simun Bin Sudjai, dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga unsur **“Setiap Orang”** terpenuhi.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetyo alias Tolo bid Bedjo Sardji, Terdakwa II atas nama Jody Prasetyo alias Simun Bin Sudjai, dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani tidak **“memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu “** sehingga unsur ini terpenuhi.

c. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa terdakwa I atas nama Andika Irwan Yuli Prasetyo alias Tolo bid Bedjo Sardji, Terdakwa II atas nama Jody Prasetyo alias Simun Bin Sudjai, dan Terdakwa III atas nama Manda Muhammad Rokim alias Boksing bin Bani telah **“bersepakat berdasarkan keterangan saksi membeli narkotika untuk dipakai bersama-sama”** sehingga unsur ini terpenuhi

2. Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

a. Keadaan memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba

b. Keadaan meringankan

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaikinya dikemudian hari

Disaat membahas mengenai putusan pengadilan maka kita tak bias lepas dari posisi sosok hakim didalam mengadili sebuah perkara serta sejumlah pertimbangannya. Untuk memahami definisi dasar pertimbangan hakim, maka kita dapat beracuan kepada definisi yang disampaikan Wiryono Kusumo, yaitu:

“Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.(S.M Amin, 2009)

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.”. (Mertokusumo, 2005)

Sehingga bisa disebutkan dasar pertimbangan adalah argumen yang dijadikan landasan didalam penyusunan pertimbangan majelis hakim sebelum menyusun analisa hukum yang lalu dipakai untuk menjatuhkan putusan pada terdakwa, dasar itu mempunyai posisi penting didalam sebuah putusan yang hakim buat karena makin baik dan tepat pertimbangannya, makin tercermin keadilan yang ada didalam diri hakim. Selanjutnya, berhubungan pada keadilan tersebut, posisi sosok hakim yang betugas mengadili serta memutuskan perkara wajib dapat dipercaya, adil serta tak

memihak. Maka dari itu, keobyektifan hakim didalam mengadili perkara, tanggungjawab atas putusan, dan kebebasannya didalam bertugas merupakan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan

Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bagi Diri Sendiri

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. (Barda Nawawi, 2002)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat (1) maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat 3 (tiga) bulan;

Putusan tersebut ditandatangani oleh Deni Lipu, S.H.maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli

Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariani Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat maka dapat diketahui pasal yang di pergunakan Hakim untuk Terdakwa Terdakwa I Andika Irwan Yuli Prasetyo als Tolo Bin Bedjo Sardji, Terdakwa II Jody Prasetyo als Simun Bin Sudjai dan Terdakwa III Manda Muhammad Rokim als Boksing Bin Bani ialah 132 ayat., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren serta Penasehat Hukum Terdakwa III

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam putusan perkara nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, diketahui bahwa pasal yang di pergunakan Hakim ialah Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa dirasa telah adil karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut ancaman hukumannya adalah

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tapi kepada Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni masing- masing hanya selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan

DAFTAR PUSTAKA

- Hari Sasangka, Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju : Bandung, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group : Jakarta, 2012
- S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita : Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002